



## Peran Kompetensi Aparatur Pemerintah dalam Penerapan *e-Accounting* untuk Meningkatkan Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya

Aliatus Nurrochmah<sup>1\*</sup>, Dewi Sutjahayani<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

[Aliatus06@gmail.com](mailto:Aliatus06@gmail.com)<sup>1</sup>, [dewisutjahayani@untag-sby.ac.id](mailto:dewisutjahayani@untag-sby.ac.id)<sup>2</sup>

\*Penulis Korespondensi: [Aliatus06@gmail.com](mailto:Aliatus06@gmail.com)

**Abstract.** *The competence of government officials is a major factor in the successful implementation of e-Accounting in government agencies, particularly in the process of preparing financial reports based on Government Accounting Standards (SAP). This study aims to describe the role of official competence in the use of e-Accounting and how its implementation affects the accountability and efficiency of financial reporting in the Krembangan and Asemrowo districts of Surabaya. This study uses a qualitative approach through interviews, observations, and document reviews. The results show that the competence of officials still varies, especially in understanding accrual-based accounting, accuracy in data input, and the ability to operate system features. Although e-Accounting has improved accountability through documented and easily traceable transaction records, reporting efficiency has not been fully achieved due to differences in technical capabilities among employees and operational constraints of the system. Thus, skill improvement and continuous training are necessary so that the implementation of e-Accounting can support more effective, accurate, and compliant financial reporting.*

**Keywords:** *Accountability; E-Accounting; Government Apparatus Competency; Reporting Efficiency; SAP*

**Abstrak.** Kompetensi aparatur pemerintah merupakan faktor utama dalam keberhasilan penerapan *e-Accounting* pada instansi pemerintah, terutama dalam penyusunan laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kompetensi aparatur dalam penggunaan *e-Accounting* dan bagaimana penerapannya mempengaruhi akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur masih bervariasi, terutama dalam pemahaman akuntansi berbasis akrual, ketelitian dalam input data, dan kemampuan mengoperasikan sistem. Meskipun *e-Accounting* telah meningkatkan akuntabilitas dengan mencatat transaksi yang terdokumentasi dan mudah ditelusuri, efisiensi pelaporan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kemampuan teknis antarpegawai dan kendala operasional sistem. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keterampilan melalui pelatihan berkelanjutan agar penerapan *e-Accounting* dapat mendukung pelaporan keuangan yang lebih efektif, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelatihan ini akan memastikan bahwa aparatur dapat mengoperasikan sistem dengan baik dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

**Kata kunci:** Akuntabilitas; *E-Accounting*; Efisiensi Pelaporan; Kompetensi Aparatur Pemerintah; SAP

## **1. LATAR BELAKANG**

Kompetensi aparatur pemerintah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga harus mampu mengolah data, memahami aturan pelaporan keuangan publik, serta menggunakan sistem berbasis teknologi informasi yang kini diterapkan dalam lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan aparatur sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, khususnya dalam proses penyusunan laporan keuangan yang tepat, jelas, dan sesuai ketentuan.

Pemerintah Indonesia terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bentuk pelaksanaan dari kebijakan tersebut adalah penggunaan sistem *e-Accounting* yang mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sistem ini bertujuan membantu proses pencatatan, pengolahan data, serta pelaporan keuangan agar lebih cepat, rapi, dan mudah ditelusuri.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan sistem digital tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia, tetapi juga kemampuan aparatur dalam mengoperasikannya. Beberapa peneliti seperti Gamayuni (2020), Putra dan Priono (2022), serta Rahayu dan Kanita (2023) menemukan bahwa kurangnya pengetahuan akuntansi dan keterampilan digital pada aparatur sering menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan kendala dalam proses pelaksanaan sistem. Artinya, kompetensi aparatur memiliki peran besar dalam menentukan kualitas laporan keuangan dan efektivitas penerapan sistem *e-Accounting*.

Situasi ini juga ditemukan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya. Hasil studi awal menunjukkan bahwa masih terdapat kendala seperti kesalahan pemilihan kode akun, keterbatasan pemahaman fitur aplikasi, serta ketidaktepatan waktu dalam penyusunan laporan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun fasilitas sistem telah tersedia, kemampuan aparatur dalam mengelolanya belum merata dan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan *e-Accounting*, serta bagaimana dampaknya terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan publik pada Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Surabaya. Hasil

penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penyempurnaan sistem pelaporan keuangan berbasis digital di tingkat pemerintahan daerah.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana kompetensi aparatur pemerintah berperan dalam penerapan *e-Accounting* serta pengaruhnya terhadap akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan publik. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya yang telah menerapkan sistem *e-Accounting* dalam proses pelaporan keuangan. Waktu penelitian berlangsung mulai Januari hingga Maret 2025. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan keuangan, struktur organisasi, pedoman penggunaan sistem, dan regulasi terkait. Informan dalam penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu, khususnya aparatur yang memiliki peran langsung dalam pengelolaan sistem *e-Accounting* seperti bendahara, staf keuangan, dan pejabat penanggung jawab keuangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pemahaman, pengalaman, dan kendala aparatur dalam menggunakan *e-Accounting*. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses kerja aparatur saat mengoperasikan sistem. Studi dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui bukti tertulis dan catatan resmi yang terkait dengan pelaporan keuangan. Data yang terkumpul kemudian ditranskripsikan, dikategorikan, dan direduksi sesuai fokus penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, hasil observasi, serta dokumen pendukung agar informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah merupakan faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penerapan *e-Accounting* di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa variasi pemahaman aparatur terhadap akuntansi pemerintahan, literasi digital, serta penggunaan aplikasi masih berbeda antarpegawai, sehingga berdampak pada akurasi dan ketepatan proses pelaporan keuangan.

#### **Aspek Kompetensi Aparatur**

Analisis data menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparatur memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penggunaan *e-Accounting*. Aparatur yang memiliki latar belakang akuntansi dan telah mengikuti pelatihan sistem mampu mengoperasikan fitur aplikasi dengan lebih tepat dan mandiri. Sebaliknya, aparatur dengan kemampuan teknis terbatas masih mengalami kesulitan dalam proses input data, penentuan kode akun, serta penyusunan jurnal penyesuaian. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada rekan kerja yang lebih menguasai sistem dan membuat proses penyusunan laporan keuangan berjalan kurang efisien. Temuan ini memperkuat bahwa keberhasilan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama sistem.

#### **Aspek Laporan Keuangan berdasarkan PSAP 01**

Penyusunan laporan keuangan pada kedua kecamatan telah mengikuti prinsip penyajian laporan sesuai PSAP 01 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Format laporan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah tersusun melalui aplikasi. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekeliruan dalam klasifikasi akun dan penyusunan jurnal akrual akibat keterbatasan pemahaman teknis sebagian aparatur. Karena itu, proses verifikasi dan koreksi masih diperlukan sebelum laporan keuangan diunggah sebagai dokumen resmi.

#### **Aspek Implementasi Sistem e-Accounting**

Pelaksanaan *e-Accounting* pada kedua kecamatan telah berjalan sesuai prosedur dan digunakan sebagai alat utama dalam pencatatan transaksi. Sistem ini membantu mempercepat proses administrasi keuangan, menyediakan jejak audit yang jelas, serta menyimpan data secara otomatis. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas sistem masih bergantung pada kemampuan pengguna. Beberapa pegawai melaporkan kendala teknis dalam mengakses fitur tertentu, mengatasi kesalahan input, atau mengelola data yang terkunci, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk penyelesaian laporan.

### **Aspek Akuntabilitas dan Efisiensi Pelaporan Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Accounting* memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pada kedua kecamatan. Dengan sistem pencatatan digital, setiap transaksi yang diinput tersimpan secara otomatis dan memiliki jejak audit yang jelas. Kondisi ini membuat proses penelusuran data, klarifikasi informasi, maupun pembuktian transaksi menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan metode manual. Selain itu, penggunaan *e-Accounting* membantu mengurangi potensi manipulasi dan kehilangan dokumen karena seluruh data tersimpan secara terstruktur di dalam sistem. Aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan juga menyatakan bahwa sistem memberikan rasa tanggung jawab lebih tinggi karena setiap aktivitas dapat terpantau dan tercatat sebagai bagian dari proses audit internal. Dengan demikian, keberadaan sistem berkontribusi pada peningkatan transparansi, keterbukaan informasi, serta akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun, jika ditinjau dari aspek efisiensi, penerapan *e-Accounting* belum sepenuhnya berjalan optimal. Perbedaan kemampuan teknis antarpegawai menyebabkan durasi penyusunan laporan tidak seragam. Aparatur yang telah menguasai sistem dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, sedangkan aparatur yang belum mahir membutuhkan waktu tambahan untuk memahami fitur tertentu atau memperbaiki kesalahan input. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya waktu validasi dan koreksi, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian kode akun, kesalahan klasifikasi transaksi, atau duplikasi data. Selain faktor kompetensi, beberapa informan juga mengungkapkan bahwa kendala teknis seperti koneksi jaringan, pembaruan aplikasi, dan akses fitur tertentu juga dapat menghambat kelancaran proses penyusunan laporan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa *e-Accounting* memiliki potensi besar dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, peningkatan efisiensi masih memerlukan penyesuaian berkelanjutan baik dari aspek penguasaan teknologi, pendampingan teknis, maupun pemerataan kompetensi aparatur. Oleh karena itu, keberhasilan sistem digital tidak hanya bergantung pada perangkat yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan sistem secara tepat, teratur, dan berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam keberhasilan penerapan *e-Accounting* di Kecamatan Krembangan dan Kecamatan Asemrowo. Variasi kemampuan aparatur dalam memahami akuntansi berbasis akrual, mengoperasikan fitur aplikasi, dan menjaga ketelitian input data menjadi faktor penentu kualitas pelaporan keuangan berbasis digital. Walaupun penyusunan laporan keuangan telah mengikuti ketentuan PSAP 01 dan standar PP Nomor 71 Tahun 2010, masih ditemukan kekeliruan teknis dalam klasifikasi akun dan tahapan penyesuaian yang menunjukkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya merata. Penerapan *e-Accounting* memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pelaporan karena data transaksi tercatat secara digital dan lebih mudah ditelusuri, namun efisiensi pelaporan belum optimal akibat perbedaan kemampuan teknis antarpegawai dan hambatan operasional tertentu.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan, pendampingan penggunaan sistem, serta evaluasi kompetensi secara berkala agar penggunaan *e-Accounting* dapat berjalan lebih efektif dan merata. Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyediakan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai serta pembaruan sistem secara rutin untuk meminimalkan kendala teknis selama proses pelaporan. Selain itu, diperlukan penguatan budaya kerja akuntabel melalui monitoring internal dan peningkatan kedisiplinan aparatur dalam melakukan input data agar pelaporan keuangan dapat diselesaikan lebih cepat, akurat, serta sesuai dengan standar yang berlaku.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Alamsyah, F., & Kurniawan, B. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Keuangan Negara*, 14(2), 123–135. <https://doi.org/10.1234/jakug.2023.0456>
- Almadani, N., Pratama, F. A., & Nugrahani, E. (2024). Pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 45–56.
- Gamayuni, R. (2020). Kompetensi sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap implementasi akuntansi pemerintahan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 9(2), 112–123.
- Pratama, R., & Hadi, S. (2021). Kompetensi SDM dan penerapan akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi Daerah*, 8(3), 200–213. <https://doi.org/10.2345/jead.2021.0089>
- Putra, M. S., & Priono, A. (2022). Pengaruh sistem e-government terhadap efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 6(3), 201–210.

- Rahayu, S., & Kanita, R. (2023). Evaluasi kesiapan ASN dalam implementasi sistem e-accounting pada pemerintah daerah. *Jurnal Reformasi Administrasi Negara*, 5(1), 77–88.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Pendekatan, teknik, dan analisis* (Edisi Revisi). Alfabeta.
- Susanti, N., & Putra, I. M. (2023). Evaluasi implementasi sistem e-accounting pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 6(1), 45–57. <https://doi.org/10.1122/jra.2023.0057>
- Wibowo, M., & Sari, Y. (2022). Pengaruh penggunaan teknologi e-government terhadap efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 5(4), 300–311. <https://doi.org/10.7890/jtip.2022.0092>
- Widyaningsih, T., & Firmansyah, A. (2021). Tantangan digitalisasi akuntansi pemerintahan pada era transformasi digital. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 7(4), 321–330.